

## **Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Latihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya**

**Abel Jechlydor Nabun<sup>1)</sup>, Widyawati<sup>2)</sup>**

<sup>1) 2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : jechlydornabun@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial memiliki peran aktif dalam pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan pemberdayaan yang diberikan berupa latihan keterampilan melukis, seni musik, beladiri, serta tenis meja program pelatihan keterampilan yang dimana dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai bakat dan keterampilan dasar anak-anak jalanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi bagaimana pemberdayaan anak jalanan yang melalui program latihan keterampilan dan faktor kendala di Dinas Sosial Kota Surabaya, yang mengingat meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Surabaya. Penelitian ini berfokus pada yang dibahas oleh peneliti adalah pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan di Dinas Sosial Kota Surabaya, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berpedoman pada empat elemen dasar evaluasi kebijakan publik yaitu fokus efektifitas, efisiensi, perataan, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kendala program pelatihan. Hasil temuan penelitian ini pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya yang dilaksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri sudah berjalan dengan baik, yang telah memberikan dampak positif dan manfaat yang baik bagi anak jalanan, anak terlantar, dan anak yang memiliki masalah sosial. Dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan sumber daya manusia yang memadai untuk menenuhi kebutuhan ekonomi anak jalanan, anak terlantar, dan anak penyandang masalah sosial dapat hidup secara layak serta kebutuhan ekonomi terpenuhi tanpa mengatungkan kehidupan di jalanan lagi. Faktor kendala dalam program latihan ini adalah kurangnya kesadaran anak-anak untuk berlatih dan mengembangkan yang terdapat dalam diri mereka, sehingga hal tersebut menjadi terhambatnya proses pemberdayaan dalam diri mereka.

**Kata kunci: Evaluasi, Program Latihan Keterampilan, Dinas Sosial Kota Surabaya**

### **Abstract**

*The Surabaya City Government through the Social Service has an active role in empowering and fostering street children. Empowerment is provided in the form of training in painting skills, music, martial arts, and table tennis skills training programs which can improve skills and knowledge according to the talents and basic skills of street children. . This study aims to evaluate how to empower street children through skills training programs and the constraint factors at the Surabaya City Social Service, considering the increasing number of street children in the city of Surabaya. This study focuses on what is discussed by researchers is the empowerment of street children through training programs at the Surabaya City Social Service, using descriptive qualitative research methods that are guided by the four basic elements of public policy evaluation, namely the focus on effectiveness, efficiency, equity, adequacy, fairness, responsiveness, and training program constraints. The findings of this study are that the empowerment of street children through the skills training program at the Surabaya City Social Service which was carried out at the UPTD Kampung Anak Negeri has been going well, which has had a positive impact and good benefits for street children, neglected children, and children who have social problems. . With the support of complete facilities and adequate human resources to meet the economic needs of street children, neglected children, and children with social problems, they can live properly and fulfill their economic needs without depending on life on the streets anymore. The constraining factor in this training program is the children's lack of awareness to practice and develop what is within them, so that it hinders the empowerment process within them.*

**Keywords: Evaluation, Skills Training Program, Surabaya City Social Service**

## A. LATAR BELAKANG

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat umum. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia antara 5 sampai 12 tahun, yang melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) demi memenuhi kebutuhan makan tiap harinya. Semakin berkembangnya negara Indonesia, permasalahan anak jalanan di berbagai kota khususnya di Surabaya tidak pernah ada habisnya. Alasan adanya anak jalanan penyebab lainnya adalah biaya hidup semakin mahal, maka terjadi ketimpangan sosial dimanamana.

Lembaga pemerintah di wilayah Kota Surabaya harus lebih memberikan perhatian dan sumberdaya agar melindungi anak jalanan baik dari segi fisik maupun psikis. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada dasarnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak. Di Indonesia, untuk mewujudkan hak anak telah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar serta memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan, dan perlindungan

yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Berdasarkan undang-undang di atas maka pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pembinaan, untuk memberikan keterampilan kepada anak jalanan supaya mereka tidak berkeliaran di jalan lagi dan setelah pembinaan keterampilan itu selesai mereka bisa membuka usaha sendiri dan tentunya dengan modal usaha dari pemerintah khususnya dari Dinas Sosial. Secara umum pembinaan itu sendiri disebut sebagai perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan untuk mengasah bakat yang telah dimiliki anak jalanan.

Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dengan secara sadar, berencana, terarah, teratur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dengan tindakan bimbingan, pengarahan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Depdiknas, 2002). Thoha (2002:7) mengemukakan pengertian pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, dan perkembangan atau atas peningkatan sesuatu.

Dalam mengatasi masalah anak-anak tersebut, merupakan tugas Pemerintah sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah itu sendiri tentang pembinaan dan kesejahteraan anak jalanan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial ini tidak sekejap, dimana anak jalanan hanya dianggap sebagai obyek yang mudah dibersihkan dari jalanan, tetapi perlu ditangani secara tuntas lintas sektor secara terpadu dan berkesinambungan dan tidak hanya terfokus kepada anak jalannya saja tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial memiliki peran aktif dalam membina anak jalanan. Dengan dikelurkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota

Surabaya. Dimana Pembinaan tersebut dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Pondok Sosial ini sebagai tempat pelayanan kesejahteraan sosial khusus anak naka, anak jalanan dan anak terlantar di wilayah Kota Surabaya. Tugas yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) tidak cukup merazia dan menekan jumlah anak jalanan, namun juga harus ada langkah selanjutnya yang berguna bagi anak jalanan agar mereka tidak lagi turun ke jalanan untuk mencari uang untuk menuhi kebutuhan kesehariannya. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Surabaya harus lebih fokus terhadap program pemberdayaan anak jalanan.

Pelayanan terhadap anak jalanan yang diberikan di UPTD Kampung Anak Negeri dimaksud dapat menimbulkan keuntungan, kemanfaatan, keterampilan, dan bakat sehingga mereka dapat melakukan fungsi sosial di masyarakat. Selain itu melalui pembinaan tersebut memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan bakat mereka masing masing. Agar mereka bisa kembali ke keluarga dan masyarakat agar tidak turun ke jalanan lagi. Oleh karena itu, kegiatan yang menjadi Program di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya dalam menangani anak jalanan, yaitu keterampilan melukis, seni musik, beladiri, dan tenis meja. Program pelatihan keterampilan yang dimana dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai bakat dan keterampilan dasar anak-anak jalanan, tujuan program pelatihan keterampilan ini untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak-anak jalanan, selain itu kebutuhan akan pelatihan keterampilan agar anak-anak jalan dapat mengasah dan mengembangkan bakat mereka masing-masing.

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurul Tiantiana yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Anak Jalanan Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang*. Kebijakan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menangani anak jalanan pada Dinas Sosial

Kota dan tenaga kerja Kota Tanjung pinang pada tahun 2014, belum berjalan dengan baik karena masih banyak hal yang harus perlu diperhatikan. Walaupun sudah memiliki pekerja sosial yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak. Peningkatan kapasitas pendamping dan kelembagaan melalui seleksi, sertifikasi, dan bimbingan pemantapan atau pelatihan bagi pekerja sosial, tenaga kerja sosial, relawan sosial, serta lembaga kesejahteraan sosial. Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana tetapi jika tidak di dukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk melaksanakan kebijakan maka efektifitas kebijakan akan sulit dicapai.

Penelitian kedua yang di lakukan oleh Revanlee Anandar, Budhi Wibhawa, dan Hery Wibowo yang berjudul *Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pendidikan Terhadap Anak Jalanan Binaan di Rumah Singgah*. Hasil dalam penelitian ini, memberikan pendidikan pada anak jalanan adalah sangat penting dimana pendidikan harus mampu menyumbangkan sumber pengetahuan serta wawasan pada anak jalanan sehingga mereka mempunyai bekal kedepan untuk menjadi landasan hidup mereka.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dyah W. L, yang berjudul *Evaluasi Program Pendidikan Non Formal Melalui Rumah Belajar Bagi Anak Jalanan di Yayasan Keluarga Anaak Langit Kota Tanggerang*. Hasil penelitian ini bahwa pendidikan non formal yang dilakukan yayasan keluarga anak langit telah memberi dampak positif dan manfaat yang baik bagi kehidupan anak jalanan dan anak yang kurang mampu.

### 2. Pengertian Evaluasi

Menurut King dalam Wirawan (1012:64), evaluasi merupakan suatu proses penilaian sistematis untuk menyediakan informasi dapat dipercaya mengenai karakteristik, aktifitas, dan keluaran program atau kebijakan. Untuk tujuan penelitian ini,

meyatakan pentingnya penggunaan dengan menyignifikasikan bahwa evaluasi harus dipakai untuk suatu tujuan penilaian. Evaluasi sering dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu. Proses evaluasi suatu pelaksanaan kegiatan dapat menampilkan informasi tentang sejauh mana tentang kegiatan itu sudah di laksanakan atau hal yang telah dicapai. Standar dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dapat dijadikan arahan untuk menilai ketercapaian suatu program, kesesuaian dengan tujuan, keefektifan, efisien, dan hambatan yang ditemukan dalam suatu program.

Menurut Daryanto (2008:10), evaluasi merupakan pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri seseorang dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi seseorang. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) dalam Prihatin (2011:164), mengartikan evaluasi sebagai suatu proses dari pengumpulan data dan analisis informasi mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu sebagai bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji pencapaian program.

Apabila pendekatan ini di aplikasikan dalam konteks pendidikan berarti evaluasi dapat diartikan sebagai serangkaian langkah strategi agar mengambil keputusan dinamis yang diberikan pada pembuat proses pengajaran atau pembelajaran proses itu akan terdiri dari 1) mengumpulkan data yang tepat, 2) membuat keputusan, dan 3) membuat keputusan sesuai data dengan tindakan relevan.

Berdasarkan pengertian evaluasi dari para ahli yang sudah dikemukakan terdapat beberapa pokok pikiran yaitu:

- a) Pengamatan untuk mengumpulkan data dan fakta.
- b) Penggunaan pedoman yang telah ditetapkan.
- c) Membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.
- d) Pengambilan keputusan atau penilaian.

### 3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan atau kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Friedrick dalam Thona, (2018:107) meyakini bahwa kebijakan publik adalah satu tindakan publik yang mengarah kepada tujuan yang sudah diusulkan oleh seseorang, pemerintahan atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu yang berhubungan dengan adanya hambatan tertentu atau mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Menurut Mac Rae dan Wilde dalam Islamy, (1998:8) mengatakan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang memiliki pengaruh penting pada sejumlah orang. Pengertian ini memiliki maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait, yaitu pilihan pemerintah dan kebijakan itu mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.

#### a) Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson (2004:94) sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut yang akan dilakukan pemerintah sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilakukan.
- 2) Kebijakan distributif, kebijakan regulatori, dan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan pada masyarakat. Sedangkan kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa larangan atau pembatas terhadap kelompok atau masyarakat sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan untuk mengatur alokasi kekayaan, pemilikan, pendapat atau hak di berbagai kelompok dalam masyarakat.

- 3) Kebijakan simbolis dan kebijakan material. Kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran sedangkan kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit kepada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan berhubungan dengan barang umum dan barang privat. Kebijakan barang umum merupakan kebijakan bertujuan untuk mengukur pemberian barang untuk pelayanan publik sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyedia barang atau pelayanan pasar bebas.

Menurut Nugroho (2004:54-57) terdapat tiga jenis kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada makna kebijakan publik Berdasarkan maknanya, kebijakan publik adalah hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan dan hal yang ditetapkan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan.
- 2) Kebijakan publik dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama antara dua lembaga tersebut merupakan UU tingkat nasional dan peraturan daerah tingkat daerah untuk hal tertentu bersifat sementara sampai UU di buat. Bahkan di Indonesia yang mengesakan UU adalah peresiden UU itu sendiri setelah ada persetujuan dari legislatif dan eksekutif.
- 3) Kebijakan publik yang di buat oleh eksekutif di dalam didalam perkembangannya peran eksekutif tidak hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena semakin meningkat masalah kehidupan bersama sehingga diperlukan kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik. Di

Indonesia ragam kebijakan publik yang di tangani oleh eksekutif bertingkat sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah, 2) Keputusan Presiden, 3) Keputusan Menteri, dan 4) Intruksi Menteri.

#### b) Proses Kebijakan Publik

Menurut Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2005:107) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decition making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan suatu kebijakan supaya mencapai hasil evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

#### 4. Evaluasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya evaluasi merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang sudah dilaksanakan agar digunakan untuk meramalkan, menghitung, dan mengendalikan jalannya program ke depannya supaya jauh lebih baik. Oleh karena itu evaluasi lebih bersifat memandang kedepan ketimbang melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang sudah direncanakan sebelumnya yang dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan

balik untuk perencanaan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang (Yusuf, 2000:3).

Menurut Winarno (2008:225), bila kebijakan dilihat sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilaksanakan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Sering terjadi, kebijakan publik yang gagal meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan itu, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat penyebab kegagalan satu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai suatu kebijakan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan publik di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara profesional akan menghasilkan temuan yang obyektif adalah temuan apa adanya, baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi serta pada akhirnya agar memberikan manfaat pada perumusan kebijakan, pembuat kebijakan, dan masyarakat.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan

dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap saja, melainkan untuk seluruh proses kebijakan. Dengan begitu, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan agar menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, ataupun tahap dampak kebijakan.

#### a) **Kriteria Evaluasi**

Menurut Willam Dunn (2003:610), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan khususnya pada evaluasi program, yaitu sebagai berikut:

##### 1) **Efektivitas**

Berkenaan dengan apakah program atau kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalis teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

##### 2) **Efisiensi**

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalis ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya yang diukur dari ongkos moneter.

##### 3) **Perataan**

Kebijakan atau program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.

##### 4) **Kecukupan**

Berkenaan dengan jauh suatu tingkat efektif memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

## 5) Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu, kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

## 6) Ketepatan

Suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk surat pertanggung jawaban dan yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam, mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (dalam Arikunto, (2002:14)) mengklasifikasikan metode pendekatan Patton dan Sawicki yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi enam bagian.

Pertama yaitu *before and after comparisons*. Metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan program diimplementasikan.

Kedua yaitu *with and without comparisons*. Metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan perbandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapatkan kebijakan atau program, yang telah diperbaharui dengan

masukannya perbandingan kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.

Ketiga yaitu *actual versus planned performance comparisons*. Metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).

Keempat yaitu *experimental (controlled models)*. Metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

Kelima yaitu *quasi experimental models*. Metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan atau pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.

Keenam yaitu *costoriented models*. Metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap rencana.

## b) Fungsi Evaluasi

Fungsi evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2004:463) mempunyai empat fungsi, merupakan eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui proses evaluasi dapat menggambarkan pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang akan diamati.

- 1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan.
- 2) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai

kekelompok saran kebijakan atau ada kebocoran atau penyimpangan.

- 3) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

Evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik.

Menurut Nugroho (2004:185), evaluasi kebijakan dilaksanakan agar menilai hasil yang sudah dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang sudah dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau output, jangka panjang atau *outcome*. Evaluasi penilaian komprehensif terhadap:

- 1) Pencapaian target (*output*).
- 2) Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*).
- 3) Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian.
- 4) Perbandingan valnesi kinerja kebijakan dengan melakukan (*henchmarkino*) dengan kebiakaan yang sukses.
- 5) Identifikasi faktor pendukung kegagalan sehingga menimbulkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi agar menanggulangi kesenjangan. Fungsi dari evaluasi kebijakan publik.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008: 227), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa

yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### c) Ciri-Ciri Evaluasi

Sutjipta (2009) dalam evaluasi terdapat delapan ciri-ciri evaluasi yang meliputi:

- 1) Kualitas : Apakah program baik atau tidan baik, kualitas isi program, kegiatan pendidik, media yang digunakan, dan penampilan pelaksanaan program.
- 2) Kesesuaian (*suitability*) : Pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 3) Keefektifan : Seberapa jauh tujuan tercapai.
- 4) Efisiensi : Penggunaan sumber daya dengan baik.
- 5) Kegunaan : Kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat.
- 6) Fokus nilai : Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
- 7) Interdependensi fakta nilai : Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta ataupun nilai.
- 8) Orientasi masa kini dari masa lampau : Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

### d) Jenis Evaluasi

Jenis evaluasi secara umum menurut Nugroho (2008: 537) mengelompokan evaluasi dalam tiga jenis merupakan, yaitu:

#### 1) Evaluasi Tahap Perencanaan

Kata evaluasi sering kali digunakan dalam tahap perencanaan dalam mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan

terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri.

## 2) Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi merupakan suatu kegiatan dengan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan perencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan mentoring. Mentoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat bahwa program tersebut direncanakan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Mentoring melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil kebijakan tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut, baik membantu atau menghambat.

## 3) Evaluasi Tahap Paska Pelaksanaan

Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tapi hasil pelaksanaan yang dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

## e) Model Evaluasi

William Dunn (dalam Keban, 2008:143), mengemukakan beberapa model evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari:

### 1) *The Adversary Model*

Para evaluator dikelompokkan jadi dua, yang pertama bertugas menyiapkan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk mendapatkan hasil evaluasi program yang negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak sesuai sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.

### 2) *The Transaction Model*

Model ini untuk melihat penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistic, terdiri dua jenis, yaitu: evaluasi responsif yang dilaksanakan melalui kegiatan secara informal, berulang-ulang agar program yang sudah direncanakan agar dapat digambarkan dengan akurat; dan evaluasi iluminatif bertujuan untuk mengkaji program inovatif dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha menjelaskan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.

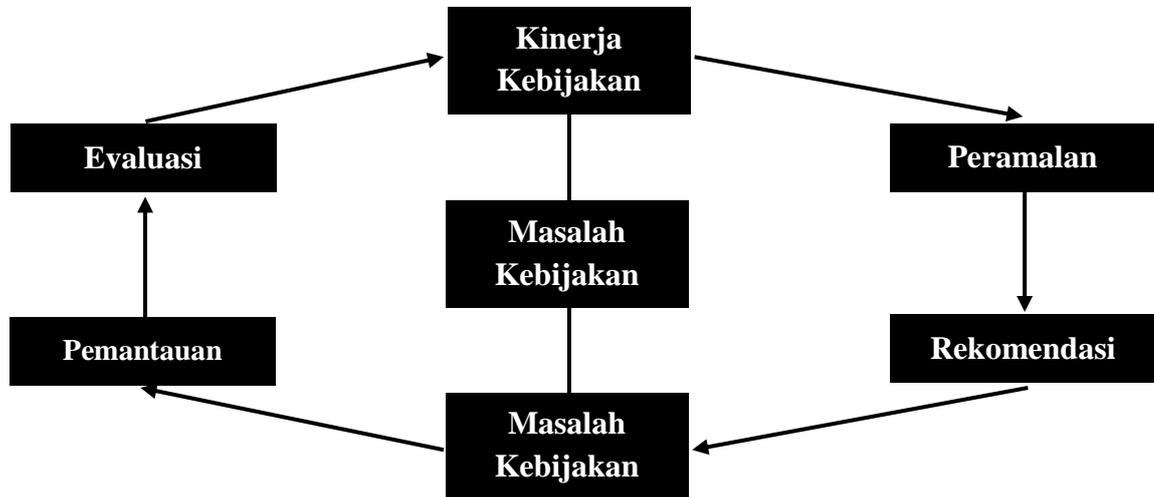
### 3) *Good Free Model*

Model evaluasi ini memiliki tujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari

program yang direncanakan. Sehingga evaluator (*peneliti*) di posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas. Berikut

adalah gambar model evaluasi kebijakan publik:

Gambar 1. Model Evaluasi Kebijakan Publik



Sumber: William Dunn (2003:194)

#### f) Macam Evaluasi

Hous, dalam Dunn, (2003: 194) menjelaskan, ada 3 macam evaluasi kebijakan publik, ialah:

##### 1) Evaluasi *Administrative*

Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan sebatas dalam lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah. Dilaksanakan untuk mengevaluasi proyek pemerintah, biasanya berkaitan dengan masalah keuangan dan sebagai alat mengetahui apakah proyek pemerintah itu sudah sesuai dengan yang direncanakan (*the expected goals*).

##### 2) Evaluasi *Yudisial*

Evaluasi ini melihat apakah kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial adalah lembaga-lembaga hukum, pengadilan, dan kejaksaan.

##### 3) Evaluasi *politik*

Pada umumnya evaluasi politik dilakukan oleh lembaga politik,

misalnya parlemen dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

#### 5. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses pemberian kekuatan dan kemampuan pada seseorang atau kelompok orang yang tidak berdaya agar mereka bisa menjadi lebih berdaya. Menurut Suharto dalam buku pemberdayaan masyarakat desa berbasis teknologi tepat guna di daerah (2021:18), mengatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya terhadap kelompok rentan dan lemah sehingga mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan dalam : (1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka tidak memiliki kebebasan (*freedom*), yang artinya bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; (2) Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; serta (3)

Berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beberapa para ahli berikut ini mengemukakan definisi pemberdayaan dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan. Menurut Mardikunto dan Soebianto (2013 :100), pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memperdayakan atau memperkuat kemampuan masyarakat dengan peroses belajar bersama-sama yang partisipatif, untuk mewujudkan terjadinya perubahan perilaku dan tingkah laku pada diri semua kelompok, individu, dan kelembagaan yang terlibat di dalam proses pembangunan, untuk terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, partisipatif, serta mandiri yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Suharto (2014:67) pelaksanaan peroses untuk mencapai tujuan yang di tetapkan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjasi 5P, merupakan sebagai berikut pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pemberdayaan yang sesuai dengan pengertian pemberdayaan yang diungkapkan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk membuat suatu organisasi atau masyarakat yang tidak berdaya untuk mendapatkan akses untuk merekan menjadi lebih berdaya.

## 6. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan sekelompok anak-anak yang hidup di jalan yang tidak memiliki tali ikatan dengan keluarganya. Istilah anak jalanan secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan dalam masyarakat walaupun memiliki hak kehidupan yang layak seperti anak pada umumnya, tetapi realita berbeda. Istilah anak jalanan kemudian di defenisikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupi anak-anak jalanan.

Menurut A. Sudiarja (1997:13) mengatakan bahwa sulit menghapus anggapan umum bagi anak jalanan, yang sudah terlanjur

melekat pada masyarkat dimana mereka itu anak nakal, pengacau ketertiban, jorok, dan mengotori kota. Menurut Indrasari Tjandraningsih (1995:13), yaitu anak yang bekerja secara informal di kota yang lebih dikenal dengan anak jalanan, juga di laporkan dalam kondisi yang lebih rentan terhadap kekerasan dan kecanduan obat bius. Dari pengertian tersebut, anak jalanan merupakan anak yang dipaksa keberadaannya karena suatu keadaan antara lain faktor ekonomi, keharmonisan, keluarga, kriminalitas, dan sebagainya. Yang ia sendiri tidak menginginkannya sehingga membuat dirinya harus mempertahankan untuk terus hidup dengan bekerja apa saja, dimana saja, dan kapan saja mereka bisa (R. Moh. Yakobw., 2000:17).

### a) Karakteristik Anak Jalanan

Karasteristik anak jalanan dalam Asmawati (2014:147) mengelompokan anak jalanan menjadi dua yaitu anak semi jalanan dan anak jalanan murni. Anak semi jalanan diistilakan untuk anak yang hidup dan mencari kehidupan di jalan, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan keluarga. Sementara itu, anak jalanan murni diistilakan anak yang hidup dan menjalani kehidupan di jalan tanpa mempunyai hubungan dengan keluarganya.

Menurut Tata Sudrajat (1995) membagi anak jalanan dalam tiga kelompok yang berdasarkan hubungan dengan keluarganya, diantaranya 1) anak yang putus hubungan dengan orangtuanya, tidak sekolah, dan tinggal di jalanan; 2) anak yang hubungannya tidak teratur dengan orangtuanya, tidak sekolah, kembali ke orangtua seminggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali bisa disebut anak yang bekerja di jalan; serta 3) anak yang putus sekolah, kelompok ini termasuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan.

## b) Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Menurut Abu Huraerah (2016:78) yaitu beberapa penyebab munculnya anak jalanan, sebagai berikut:

- 1) Orang tua menyuruh anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga.
- 2) Perlakuan salah terhadap anak dan kasus kekerasan oleh orang tua sehingga anak turun ke jalan.
- 3) Anak terancam putus sekolah karna orangtua sudah tidak mampu membayar.
- 4) Makin banyak anak hidup dijalan karna biaya kontak mahal.
- 5) Timbulnya dengan pesaing pekerja dewasa dijalan sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan yang sangat beresiko.
- 6) Anak jadi lebih lama di jalan sehingga timbul masalah baru.
- 7) Anak jalanan akan jadi korban kekerasan dan pemerasan.

## c) Faktor Pendorong Anak Turun ke Jalan

Herlina Astuti dalam Adriyanti Mustikan (2014:148) mengungkapkan ada faktor yang mendorong anak turun ke jalan, yaitu:

- 1) Tingkat mikro (*imendiate cause*). Faktor yang menghubungkan dengan keluarga dan anak. Sebab yang bisa diidentifikasi dari anak jalanan lari dari rumah, jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung lari dari rumah dan turun ke jalan, disuruh kerja saat masih sekolah, bermain, serta di ajak teman. Penyebab yang berasal dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kebutuhan dasar, kondisi psikologi yang ditolak oleh orangtua, serta didikan yang salah dari orangtua.
- 2) Tingkat meso (*underlying cause*) faktor masyarakat. Sebab yang dapat diidentifikasi, yaitu pada komunitas

masyarakat miskin anak adalah aset guna meningkatkan ekonomi keluarga oleh karenanya anak-anak diajarkan untuk bekerja.

- 3) Tingkat makro (*basic cause*) factor yang berhubungan dengan masyarakat, penyebab banyak waktu di jalan.

## 7. Pengertian Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu pendidikan dalam jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga peserta orerasional dapat belajar teknik pengerjaan serta keahlian pada tujuan tertentu.

Pelatihan Eustasia Cristine Martati dalam Simanjuntak (2021:26) mendefinisikan pelatihan adalah bagian dari infestasi sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan kinerja anggota, pelatih biasa melakukan pelatihan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan diberikan dalam waktu yang sangat pendek untuk membekali seseorang dengan keterampilan bekerja.

Pelatihan Eustasia Cristine Martati dalam Delsler (2021:26) ialah proses mengajar karyawan atau anggota yang baru atau yang lama untuk mengembangkan keterampilan dasar yang mereka butuhkan dalam menjalankan pekerjaan dan keterampilan, pelatihan merupakan latihan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja, karyawan atau kelompok, baik yang lama ataupun yang baru perlu mengikuti pelatihan karna adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berupa perubahan lingkungan atau pun meningkatkan keterampilan dasar.

### a) Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelatihan

Adapula faktor yang merujuk kearah efektifitas pelatihan Eustasia Cristine Martati dalam Rival (2021:27) yaitu sebagai berikut : materi atau isi penelitian, metode pelatihan, pelatih,

peserta pelatihan, sarana pelatihan, dan evaluasi pelatihan.

## b) Metode Pelatihan

Eustasia Cristine Martati dalam Notoatmodjo (2021: 28) metode terbagi menjadi dua merupakan, pelatihan diluar pekerjaan dan pelatihan di dalam pekerjaan.

### 1) Pelatihan di Luar Tugas

Pelatihan dengan menggunakan metode ini artinya peserta pelatihan keluar sementara dari pekerjaannya kemudian mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan teknik belajar yang semestinya. Pada umumnya teknik ini memiliki dua macam teknik yaitu, Teknik presentasi informasi dan simulasi. Teknik presentasi informasi merupakan menyajikan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan keterampilan baru kepada peserta.

### 2) Pelatihan di Dalam Tugas

Pelatihan ini di bentuk penugasan pegawai dibawah bimbingan superfisor yang sudah berpengalaman. Dalam metode ini perlu menerapkan prinsip sebagai berikut: (a) Adanya pembimbing yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya; (b) Tersedia waktu yang cukup untuk dapat mencapai tingkat keterampilan; dan (c) Sikap serta perilaku pegawai yang mendukung (rajin, tekun, dan antusias).

## c) Tujuan Pelatihan

Tujuan umum pelatihan diantaranya (1) Untuk mengembangkan keahlian, 2) Untuk mengembangkan pengetahuan, dan 3) Untuk mengembangkan sikap. Sedangkan komponen sebagaimana dijelaskan Eustasia Cristine Martati dalam

Mangkunegara (2021: 30) yaitu sebagai berikut (1) Tujuan pengawasan dan pelatihan harus jelas; (2) Para pelatih harus ahli dan berkualitas; dan (3) Materi pelatihan dan pengembangan.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin menggambarkan bagaimana *Evaluasi Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya*. Penelitian ini dilakukan dengan cara opservasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara akan dilakukan peneliti pada orang yang akan diamati, lalu peneliti juga akan melakukan pengamatan atau observasi terhadap objek yang akan diteliti pada dinas Sosial Kota Surabaya dan UPTD. Kemudian hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut akan peneliti kembangkan dalam bentuk tulisan dan melakukan pembahasan dengan teori yang sudah diterapkan.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah catatan atas terkumpulnya fakta yang ada, yang merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang sebagai pengukuran atau pengamatan suatu variable yang bentuknya dapat berupa kata-kata atau tindakan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- Data primer, merupakan data yang di peroleh dengan melakukan penelitian secara langsung objek penelitian dengan mengamati atau wawancara, peneliti menggunakan data ini agar mendapatkan informasi secara langsung dari objek penelitian, yaitu tentang evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program pelatihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Data sekunder, merupakan data yang dapat diperoleh melalui media dan berbagai

macam sumber seperti buku harian, dokumen resmi dari pemerintah. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai untuk melengkapi data atau informasi yang telah dikumpulkan melalui petugas atau pelatihan anak jalanan pada Dinas Sosial.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a) Wawancara, merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*). Maksud untuk mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Lincoln, 1985), antara lain: mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, dan tuntutan.
- b) Observasi atau pengamatan, adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra. Dengan melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian.
- c) Dokumentasi, adalah data tertulis atau gambar seseorang untuk melengkapi data wawancara dan untuk membantu peneliti mencapai tujuan, dokumen yang dalam bentuk peraturan, kebijakan, catatan, dan biografi.

### 4. Teknis Analisis

- a) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis, dan menyisihkan informasi yang tidak relevan guna untuk mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan

sehingga dapat dicatat secara teliti dan rinci.

- b) Penyajian data, adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c) Verifikasi data, merupakan kegiatan akhir dari analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yangditetapkan akan terus menerus diverifikasikan hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Beralamat di Jl.Arief Rahman Hakim No. 132-133, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jawa Timur. Dinas Sosial Kota Surabaya di bentuk pada tahun 2001, dinas Sosial merupakan bagian dari pemerintahan kota surabaya yang bertugas di bidang sosial. Kemudian dalam rangka menjalankan otonomi daerah yang luas, bertanggung jawab, dan nyata pada pemerintah Kota Surabaya serta untuk mendukung peyelenggara pemerintahan dan pembangunan sebagai konsekuensi sebagai penerima kewenangan daerah. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya merasa perlu mengatur kembali Dinas Sosial kota Surabaya. Untuk itu pemerintah menetapkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2001 tentang organisasi Dinas Kota Surabaya.

Dalam Perda tersebut pemerintah melakukan penetapan pembentukan dinas-dinas pada Kota Surabaya yang terdapat 23 dinas, yang termasuk di dalamnya Dinas Sosial. Dinas Sosial merupakan hasil peleburan dari bagian sosial dan cabang Dinas Sosial merupakan instansi vertikal pemerintah kota. Dinas Sosial memiliki tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial yang meliputi perencanaan, rehabilitas sosial, peyuluhan, penyusunan program, penyelenggara bantuan sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan peraturan Wali Kota Surabaya No. 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya adalah tugas Dinas Sosial merupakan melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Sosial serta melaksanakan pembantuan yang diberikan pemerintah kota dan atau pemerintahan propinsi.

Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b) Penyelenggara urusan pemerintah dalam pelayanan umum di bidang sosial.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d) Pengolahan ketatausahaan dinas.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepalah daerah atau wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi dari setiap jabatan kantor Dinas Sosial Kota Surabaya, diantaranya yaitu:

**a) Kepala Dinas**

- 1) Memimpin kelembagaan dinas sosial.
- 2) Merumuskan kebijakan lembaga.
- 3) Membina dan mengendalikan.
- 4) Mengkoordinasikan dan mempertanggung jawab kebijakan teknis pelaksana urusan pemerintahan kota atau daerah berdasarkan berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan dalam bidang sosial.
- 5) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 6) Peyelenggara urusan pemerintah dan peyelenggara sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 7) Pembinaan dan pelaksanaan tugaas sesuai dengan lingkup tugas.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

**b) Sekretariat**

- 1) Pelaksanaan kordinasi perencanaan program, anggaran, dan laporan dinas.
- 2) Pemberian rekomendasi undian skala kota.
- 3) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- 4) Pengelolah administrasi kepegawaian.
- 5) Pengelola surat menyurat, dokumentasi rumah tangga dinas, perlengkapan, peralatan kantor, kearsipan, dan perpustakaan.
- 6) Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan atau peralatan kantor.
- 7) Pelaksana hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- 8) Penyusun perencanaan bidang sosial skala kota.
- 9) Pelaksanaan kordinasi pemerintah di bidang sosial skala kota.
- 10) Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksana pedoman dan standarisasi.
- 11) Pelaksanaan kegiatan atau program di bidang sosial skala kota.
- 12) Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
- 13) Pemberian izin pengumpulan uang skala kota.

**c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- 2) Menyiapkan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian.
- 3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian.
- 4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d) Sub Bagian Keuangan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang keuangan.
- 3) Menyiapkan bahan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan.
- 4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 5) Melaksanakan tugas yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

**e) Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Swadaya Sosial**

- 1) Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan atau non perizinan atau rekomendasi pada bidang bina sosial keagamaan dan swadaya.
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang bina Sosial keagamaan dan swadaya.
- 3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pada bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial.
- 4) Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial.
- 5) Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama lembaga dan instansi lain di bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial.
- 6) Pelaksanaan pengumpulan data di bidang keagamaan dan swadaya sosial.
- 7) Pelaksanaan pengumpulan data di bidang keagamaan dan swadaya sosial.
- 8) Pelaksanaan pertimbangan pemberian bantuan pada lembaga keagamaan.

- 9) Pelaksanaan fasilitas penyelenggara kegiatan keagamaan
- 10) Pelaksanaan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan perjuangan, serta nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.
- 11) Pelaksanaan pemelihara dan perbaikan Taman Makam Pahlawan.
- 12) Penyiapan kelengkapan usulan, penganugrahan gelar Pahlawan Nasional, dan printis kemerdekaan.
- 13) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi swadaya masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial.
- 14) Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- 15) Pelaksanaan pengurusan calon-calon peserta pendidik dan pelatihan pekerja sosial skala kota.
- 16) Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.
- 17) Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi ijin undian gratis berhadiah di tingkat kota.
- 18) Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi ijin pengangkatan anak skala kota.
- 19) Pelaksanaan proses penerbitan surat tanda pendaftaran, surat pendaftaran ulang, dan rekomendasi bagi organisasi sosial skala kota pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan atau non perizinan yang telah diterbitkan.
- 20) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial.
- 21) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaksanaan tugas.
- 22) Pelaksanaan laporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

23) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan fungsinya.

**f) Seksi Bina Sosial Keagamaan**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang bina sosial keagamaan.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksana program kerja dan petunjuk teknis di bidang bina sosial keagamaan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial keagamaan.
- 4) Menyiapkan bahan pelaksana kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina sosial keagamaan.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksana pengumpulan data di bidang keagamaan.
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pertimbangan pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan.
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas penyelenggara kegiatan keagamaan.
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang bina sosial keagamaan.
- 9) Menyiapkan bahan pelaksana monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 10) Menyiapkan bahan pelaksana indikator kinerja sesuai bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
- 11) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial sesuai tugas dan fungsi.

**g) Seksi Bina Swadaya Sosial**

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses teknis perijinan di bidang swadaya sosial.

- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kerja di bidang bina swadaya sosial.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang bina swadaya sosial.
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang bina swadaya sosial.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga serta instansi lain di bidang bina swadaya sosial.
- 6) Menyiapkan bahan pengumpulan data di bidang bina swadaya sosial.
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai kesetiakawanan sosial sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.
- 8) Menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawan.
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan kelengkapan usulan penganugrahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan.
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan jaringan terhadap organisasi swadaya masyarakat dan penanganan permasalahan sosial.
- 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial.
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitas potensi kesejahteraan sosial.
- 13) Menyiapkan bahan pelaksana pengurusan calon peserta pendidikan profesi sosial skala kota.

- 14) Menyiapkan bahan pengusulan calon peserta pendidik dan pelatih pekerja sosial skala kota.
- 15) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses pemberian rekomendasi ijin pengangkatan anak skala kota.
- 16) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses pemberian ijin pengumpulan sumbangan skala kota.
- 17) Menyiapkan bahan pelaksanaan proses penerbitan surat tanda pendaftaran dan surat tanda pendaftaran ulang dan rekomendasi bagi organisasi sosial skala kota.
- 18) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan atau non perizinan yang diterbitkan.
- 19) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawas dan pengendalian di bidang bina swadaya sosial.
- 20) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 21) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Efektivitas

Berkenaan dengan apakah program atau kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalis teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa, program latihan dari dinas sosial terhadap anak jalanan atau mempunyai masalah sosial membawa sudah efektif karena memberikan dampak yang positif pada anak-anak jalanan yang dimana mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang diberikan oleh pembina dan pelatih UPTD. Mereka menjadi percaya diri yang dapat menjadikan mereka pribadi yang tidak takut dalam

menghadapi tantangan, menjadi pribadi yang mandiri sehingga memiliki rasa tanggung jawab, dan disiplin. Dengan meningkatkan keterampilan yang ada pada anak-anak. Dinas Sosial telah memberikan bantuan sarana prasarana untuk mendukung pelatihan minat dan bakat pada anak jalanan, anak terlantardan anak bermasalah sosial. Program latihan dari Dinas Sosial sendiri memiliki tujuan yaitu menjadikan anak-anak mandiri dengan keterampilan yang mereka miliki, mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan sikap mereka.

## 3. Efisien

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Pemberdayaan anak jalanan adalah upaya untuk menciptakan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa, hasil atau nilai program latihan keterampilan dari dinas sosial Kota Surabaya sudah efisien karena dapat di perlukan bagi anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri karena melalui program latihan tersebut anak-anak mendapatkan banyak pembelajaran baru baik dari segi kreativitas dan keterampilan maupun pendidikan yang dapat menjadikan bekal untuk nantinya atau dapat membuka usaha dan juga mampu menangani sesuatu dengan kemampuan atau potensi yang telah mereka pelajari sehingga membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri akan potensi yang mereka miliki, dan mampu mengandalkan diri sendiri. Selain itu dapat dianggap di perlukan karena hal itu dapat mempengaruhi tujuan lain tujuan lainnya ialah membentuk karakter dari anak-anak terkhusus bagi anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif sehingga anak-anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat

dan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang mandiri.

#### 4. Pemerataan

Kebijakan atau program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan. Berdasarkan pada hasil temuan peneliti pemerataan program latihan keterampilan yang diberikan ke anak jalanan, anak bermasalah sosial, dan anak terlantar sudah secara merata merata. Dengan pemberian latihan keterampilan sesuai minat dan bakat mereka memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka baik dari pendidikan, fasilitas, serta kebutuhan mereka masing-masing. Memberikan pelatihan moral dengan ini pemerataan dalam pemberdayaan anak jalanan, anak terlantar, anak bermasalah sosial dapat merata tanpa membedakan latar belakang mereka dan mendapat hak-hak mereka sebagai warga negara.

#### 5. Kecukupan

Berkenaan dengan suatu tingkat efektif memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Salah satu tujuan dari program latihan keterampilan adalah dapat dapat meningkatkan keterampilan pada anak jalanan .

Berdasarkan pada hasil temuan peneliti bahwa program latihan keterampilan sudah cukup untuk memberdayakan anak jalanan, anak yang memiliki masalah sosial, dan anak terlantar sehingga mereka dapat menerima bekal untuk kehidupan di masa mendatang. Salah satu usaha dalam memberdayakan anak jalanan, anak terlantar, dan anak yang memiliki masalah sosial melalui program latihan keterampilan, contohnya keterampilan musik, tenis meja, melukis. Tidak hanya itu, dengan pelatihan keterampilan yang dipelajari maka anak asuh UPTD dapat mampu mandiri dan bisa menangani suatu permasalahan dengan keterampilan yang mereka miliki. Contohnya

kebutuhan ekonomi anak bisa menggunakan keterampilan mereka dalam menghasilkan dan mencari uang.

**Tabel 1. Fasilitas UPTD Kampung Anak Negeri**

No.	Fasilitas UPTD Kampung Anak Negeri
1.	Ruangan Kepala UPTD
2.	Ruangan administrasi dan/atau perlengkapan kantor
3.	Asrama anak-anak
4.	Ruangan tidur 8 unit
5.	Ruangan praktek pembinaan
6.	Mushola
7.	Ruangan konseling
8.	Studi musik
9.	Alat musik
10.	Ruangan melukis dan alat lukis
11.	Ruang praktek usaha dan bahan praktek
12.	Kamar mandi
13.	Sepeda
14.	Mobil
15.	Ruangan perpustakaan
16.	Ruang makan
17.	Dapur

Sumber: UPTD Kampung Anak Negeri

#### 6. Keadilan

Berdasarkan pada hasil temuan peneliti, dalam melaksanakan program latihan keterampilan sudah adil, karena pemerintah Kota Surabaya sudah memberikan fasilitas pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, fasilitas yang mendukung atau menunjang kreativitas anak-anak. Seperti, gedung olahraga, alat musik, gedung pencak silat, fasilitas gedung asrama, para pelatih yang melatih minat dan bakat anak-anak, dan pekerja-pekerja yang lain. Serta meningkatkan rasa ingin mempelajari hal baru dan rasa ingin tahu yang tinggi dari anak-anak jalanan, anak terlantar, dan anak peyandang masalah sosial.

Program latihan keterampilan pada anak-anak rata-rata telah mencapai kinerja kerja yang baik dapat di lihat dari hasil

*feedback* anak-anak baik dari bidang pengetahuan maupun bidang kreativitas. Anak-anak memberikan *feedback* yang baik dengan mengikuti perlombaan dan memenangkan beberapa perlombaan, hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya tingkat kinerja kerja yang baik. Agar kinerja kerja berjalan dengan baik diperlukan sebuah pemantauan atau monitoring. Oleh karena itu dinas sosial melakukan monitoring secara langsung baik kepada anak-anak, para pelatih, pekerja maupun kelengkapan fasilitas, selain itu penting bagi Dinas Sosial untuk melakukan monitoring terhadap Dinas Sosial sendiri, sehingga dapat dilakukan evaluasi agar ada perubahan dan terciptanya kinerja kerja yang lebih baik.

## 7. Responsivitas

Dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu. Kriteria responsivitas dinilai sangat penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektifitas, efisiensi, dan kecukupan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa, hasil atau nilai program latihan keterampilan dari Dinas Sosial Kota Surabaya dapat dianggap di dibutuhkan bagi anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri karena melalui program latihan tersebut anak-anak mendapatkan banyak pembelajaran baru baik dari segi kreativitas dan keterampilan maupun pendidikan yang dapat menjadikan bekal untuk nantinya atau dapat membuka usaha dan juga mampu

menangani sesuatu dengan kemampuan atau potensi yang telah mereka pelajari sehingga membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri akan potensi yang mereka miliki dan mampu mengandalkan diri sendiri. Selain itu dapat dibutuhkan karena hal itu dapat mempengaruhi tujuan lain. Tujuan lainnya ialah membentuk karakter dari anak-anak terkhusus bagi anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif sehingga anak-anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat dan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang mandiri.

## 8. Kendala Program Latihan Keterampilan

Kendala pada program latihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa, Faktor kendala dalam program latihan ini adalah kurangnya kesadaran anak-anak untuk berlatih dan mengembangkan yang terdapat dalam diri mereka, sehingga hal tersebut menjadi terhambatnya proses pemberdayaan dalam diri mereka. Meskipun pemerintah sudah memfasilitasi mereka dengan baik.

## 9. Peran Pemerintah Lokal

### a) Fasilitator

Merupakan peran pemerintah sebagai fasilitator, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan. Berdasarkan hasil temuan peneliti, pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana dalam pemberdayaan anak jalanan dan membuat kebijakan dalam pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan.

**Tabel 2. Data Pegawai UPTD Kampung Anak Negeri**

No.	Nama	Jabatan
1.	Cholik Anwar, S. Kep., Ns.	Kepala UPTD
2.	Susnawati Nur Rachmatillah	Ka. Sub. Bag. Tata Usaha
3.	M. Arifin	Staf PNS
4.	Budiono, S. Or.	Pembina
5.	Syamsul Arifin	Pembina

6.	Rasditya Permana Mahendrataman, SP.	Pembina
7.	Suyipto, SH., M.Pd. I.	Pembina
8.	Suroso	Pendamping
9.	Nur Hidayad	Pendamping
10.	Imam Mu'akhir	Pendamping
11.	Antonius Sarino, SH.	Pendamping
12.	Sulastri	Juru masak
13.	Nasantul Khasanah, Amd., Kep.	Juru masak
14.	Anton Effendy Purnomo	Petugas Keamanan
15.	Edy Suyitno	Petugas Keamanan
16.	Gunarto	Petugas Keamanan
17.	Ridhani	Petugas Kebersihan
18.	Jamil	Petugas Kebersihan
19.	Intan Maulia	Pembina
20.	Pucung Dwi Handoko	Supir

Sumber: UPTD Kampung Anak Negeri

**b) Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan hasil pada temuan peneliti pemerintah menyediakan program latihan keterampilan dalam melakukan

pemberdayaan anak jalanan dan anak terlantar, dengan tujuan agar dapat memberdayakan anak jalanan, anak terlantar dan anak bermasalah sosial dengan program latihan keterampilan dapat mengembangkan bakat dan keterampilan dari anak jalanan, anak terlantar, dan anak bermasalah sosial.

**Tabel 3. Data Anak-Anak UPTD Kampung Anak Negeri**

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Umur	Jenis Masalah
1.	Ahmat Irfan	SD kelas 9	10	Anak terlantar
2.	Ahmat Irfan	SMP kelas 9	18	Anak nakal
3.	Arya Yoga Pratama	Kejar paket B kelas 9	17	Anak terlantar
4.	Bagus Gede Setiawan	SMP kelas 8	18	Anak terlantar
5.	Bintang Widiali Suargana	SMP kelas 12	19	Anak nakal
6.	Chrisna Gustavino Natsir	SMP kelas 8	17	Anak terlantar
7.	Dirly Pranindya Yudistira	SMP kelas 8	15	Anak terlantar
8.	Dirly Pranindya Yudistira	SMP kelas 8	15	Anak terlantar
9.	Dimas Galuh Prakoso	SD kelas 6	14	Anak terlantar
10.	Esta Ramadhon	SMP kelas 7	15	Anak jalanan
11.	Malvino Irgi Putra Fauzi	SD kelas 4	14	Anak jalanan
12.	Marfel Maulana	SD kelas 4	11	Anak jalanan
13.	Muhammad Fauzi	SD kelas 5	13	Anak nakal
14.	M. Jordan Adjie Pamungkas	SD kelas 5	14	Anak jalanan
15.	Moch. Riskiyani	SD kelas 1	10	Anak nakal
16.	Nadiv Deco	SD kelas 6	14	Anak nakal
17.	Radhit Pribadi Tegar	SMP kelas 9	17	Anak terlantar
18.	Pedrik	SMP kelas 8	16	Anak terlantar
19.	Reno Heri Setyawan	SD kelas 6	15	Anak terlantar

20.	Rizky Pangestu	SD kelas 4	14	Anak jalanan
21.	Sandi Prayoga	SMK kelas 10	18	Anak jalanan
22.	Syahrul Setiawan	SD kelas 11	18	Anak terlantar
23.	Vikri Dwi Firmansyah	SD kelas 4	11	Anak jalanan
24.	Rendy Prasetya	DO SD	16	Anak jalanan
25.	Raffa Erlangga Purnomo	DO SD kelas 2	12	Anak terlantar
26.	Firmansyah	SD kelas 5	12	Anak terlantar
27.	Galang Bintang Candra Winata	DO SD	14	Anak terlantar
28.	Nando Astria	DO SD	10	Anak terlantar
29.	Muhammad Rizky Saputra Subroto	-	-	Anak terlantar

Sumber: UPTD Kampung Anak Negeri 2022

### c) Katalisator

Katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti pemerintah melakukan monitoring dalam pelaksanaan program, baik memonitoring pelaksanaan program apakah berjalan dengan baik, juga melakukan monitoring fasilitas yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri dan memonitoring kinerja kariawan yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti tentang evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya yang dilaksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri sudah berjalan dengan baik yang telah memberikan dampak positif dan manfaat positif yang baik bagi anak jalanan, anak terlantar, dan anak yang memiliki masalah sosial.

Dengan dukungan fasilitas yang lengkap serta sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak jalanan, anak terlantar, dan anak peyandang masalah sosial dapat hidup secara layak dan kebutuhan ekonomi terpenuhi tanpa menggatungkan kehidupan di jalanan lagi. Faktor kendala dalam program latihan ini adalah kurangnya kesadaran anak-anak untuk berlatih dan mengembangkan yang terdapat dalam diri mereka, sehingga hal tersebut menjadi terhambatnya proses pemberdayaan dalam diri mereka.

### 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pemberdayaan anak jalanan melalui program latihan keterampilan pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

- Diharapkan Dinas Sosial terus memberikan pemberdayaan terhadap anak-anak penyandang masalah sosial anak jalanan dan anak terlantar.
- Tenaga pekerja dan pelatih UPTD Kampung Anak Negeri diharapkan terus meningkatkan kinerja yang baik dan terus meningkatkan kesabaran untuk mendidik dan melatih dalam pemberdayaan anak-anak penyandang masalah sosial, anak jalanan, dan anak terlantar agar mereka mendapatkan perhatian yang cukup.

## **F. REFERENSI**

- Anderson, J. (1978). *Public Policy Making*. New York: University of Houston.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Pendekatan Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Cook, W. S. et. al (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Irfan, I. (1997). *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Humanika.
- Mardikunto, Totok, dan Poerwoko. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Miftah, T. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Komputer Kontemporer*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Mohammad, S., Jabar, dan Arikunto. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Budi utama
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- William, D. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

